

# SUPREMASI PEMERINTAHAN DI BAWAH AGAMAWAN: MENILIK STRATEGI DISKURSIF RUHULLOH M. KHOMEINI DALAM REVOLUSI ISLAM IRAN

Rika Leli Dewi Khusaila Rosalnia  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia  
Email: rikaleli97@gmail.com

---

**Corresponding Author:** Rika Leli Dewi Khusaila Rosalnia

---

**Abstract:** Ruhollah Musavi Khomeini was a multifaceted revolutionary figure. His engagement with various scholarly discourses, prophetic historicity, and the political realities of his era profoundly influenced him. The synthesis of these influences eventually formed the new Khomeini, characterized by a pragmatic socio-political outlook. This outlook was manifested in his mission to oppose the secular regime of Reza Shah and establish an Islamic government. Based on this phenomenon, this research aims to discuss academic questions regarding Khomeini's strategy in founding an Islamic government. It concludes that Khomeini's political involvement in Iran was closely linked to the political realities he faced and the horizontality of Shia theology. His primary strategy was non-military, involving the integration and reinterpretation of various ideas, including monotheism, Shia theological doctrines, 'irfani (mystical knowledge), Islamic law, and the texts of the Qur'an and the Prophet's hadiths. This religio-political strategy effectively toppled the Pahlavi regime, leading to the establishment of an Islamic government.

**Keywords:** Ruhollah M. Khomeini, Strategy, and Islamic Government.

## Pendahuluan

Reformasi keagamaan dan revolusi Islam pada abad ke-20 yang ditengarai dengan munculnya gelombang pemikir politik Islam telah menunjukkan adanya upaya untuk membebaskan diri dari

kolonialisme, serta membentuk negara yang merdeka dari segala bentuk penindasan. Bagi John L. Esposito, sikap tegas dari para pemikir Muslim tersebut tidak lepas dari pengaruh modernisasi, sehingga menuntut adanya perubahan sistem politik negara-negara Muslim, khususnya pada awal abad ke-20. Landasannya telah dipersiapkan oleh reformis Muslim akhir abad ke-19, Jamal al-Din al-Afghani (w.1897), bapak nasionalisme Muslim modern. Bepergian dari India ke Mesir, ia menyerukan umat Islam untuk melawan imperialisme, mencari pembebasan politik dan melakukan kebangkitan intelektual yang berakar pada kembalinya Islam. Kemerdekaan dan reformasi Islam merupakan syarat yang diperlukan untuk mengembalikan kekuasaan dan kejayaan Islam yang hilang. Muhammad Abduh dari Mesir (w.1905) dan Rashid Ridha dari Suriah (w.1935) juga menginisiasi gerakan Salafiyah melalui jurnal reformisnya, al-Manār, yang berupaya menyatakan kembali doktrin-doktrin klasik guna mewujudkan reformasi politik, hukum, dan intelektual Islam. Dampak dari upaya tersebut dirasakan di seluruh dunia Muslim, sekaligus memberi informasi kepada gerakan kemerdekaan dan nasionalisme Muslim dari Afrika Utara hingga Asia Tenggara.<sup>1</sup>

Tokoh revolusioner fenomenal abad ke-20, yaitu Ruhollah Musavi Khomeini (w.1989)—selanjutnya disebut dengan Khomeini, seorang pemimpin Syi'ah (Marja'), juga memiliki rekam jejak dalam melakukan reformasi dan revolusi Islam melalui keberhasilannya dalam menumbangkan rezim otoriter Reza Pahlevi di Iran. Sosok yang telah mengguncangkan sendi-sendi pemerintahan sekuler Shah Pahlevi dan menggantikannya dengan nilai-nilai Islam Syi'ah menunjukkan kharisma dan kredibilitasnya sebagai seorang mullah yang bergelar *Ayatullah al-'Uẓma* dalam mentransformasikan doktrin Imamah Itsna 'Ashariyah ke dalam konsep perwalian ahli hukum (*wilāyat al-faqih*).<sup>2</sup> Kecenderungan pragmatis di mana para pemimpin agama memiliki ambisi untuk melakukan kontrol langsung terhadap mesin politik negara tidak dapat dipisahkan dari penegasan Uṣūlisme. Sebab, di atas landasan Uṣūlisme, doktrin *marja'īyyah* modern terbentuk dan

<sup>1</sup> John L. Esposito, "Introduction: Islam and Muslim Politics," in *Voices of Resurgent Islam*, ed. John L. Esposito (Oxford: Oxford University Press, 1983), 6.

<sup>2</sup> Hamid Dabashi, *Theology of Discontent: The Ideological Foundation of the Islamic Revolution in Iran* (New York: Routledge, 2017), 425; Mohammad Manzoor Nomani, *Khomeini Iranian Revolution and the Shiite Faith* (London: Furqan Publication, 1988), 17.

dikonsolidasikan, yang kemudian menjadi bagian fundamental dari pemerintahan Islam Iran.<sup>3</sup>

Perjalanan karir Khomeini sebagai seorang ulama *cum* politikus yang berpedoman pada tradisi islami, baik rasional maupun tekstual (Al-Qur'an dan Sunnah), menggambarkan pola multidisiplin dalam dirinya. Doktrin Syi'ah yang telah menjadi elemen konstitutif dalam dirinya tidak dapat dilepaskan dari jubah Sadriannya. Melalui gagasan Mullā Ṣadra, khususnya terkait *al-asfār al-arba'ah*, Khomeini dengan sangat teguh akan mengaktualisasikan prinsip mentransendensikan umat manusia. Sejatinya, paradigma ini yang menggiring serta melahirkan pemikiran religio-politis Khomeini, sebagaimana yang diamini oleh Hamid Algar.<sup>4</sup> Sebagai tokoh yang memiliki peran besar dalam mereformasi tatanan kenegaraan, berbagai aspek dalam diri Khomeini telah mendapatkan perhatian oleh para pengkaji, khususnya terkait gagasan *wilāyat al-faqīh*. Namun, kajian yang terkonsentrasi pada cara Khomeini menggunakan wacana dan retorika untuk melegitimasi dan mempromosikan pandangan epistemologisnya dalam revolusi Islam Iran, masih menjadi ruang kosong.

### **Tauhid: Basis Pemikiran Praksis Khomeini**

Tauhid merupakan penanda sentral dalam wacana politik Khomeini,<sup>5</sup> di mana ia memainkan peran fundamental sebagai jalan terang dalam aksi revolusinya. Embrio dari aksinya adalah paradigmanya terhadap tauhid yang tidak hanya dipandang sebagai elemen religiusitas belaka, melainkan merambah pada elemen-elemen

---

<sup>3</sup> Alessandro Cancian, "Sufi Mysticism and Uṣūlī Shi'ism: Practical Authority in Modern Iranian Shi'i Sufism," in *Shii Islam: Texts and Studies*, ed. Rodrigo Adem and Edmund Hayes, vol. 2 (Leiden: Brill, 2021), 242–244.

<sup>4</sup> Hamid Algar, "The Fusion of the Gnostic and the Political in the Personality and Life of Imam Khomeini," *Pajouheshnameh Matin* 2, no. 9 (December 21, 2000): 205–223, accessed November 29, 2023, [https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article\\_182819\\_en.html](https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_182819_en.html).

<sup>5</sup> Hal ini mendapatkan afirmasi dari pengkaji sebelumnya. Detail lengkap, lihat Ahmad Azizkhani, "The Role of Tawhid in Formulating the Late Imam Khomeini's Political Discourse," *A Research Quarterly in Islamic Theology (kalam) and Religious Studies* 17, no. 64 (March 10, 2021): 109, accessed November 18, 2023, <http://andishe.maaref.ac.ir/article-1-1154-en.html>.

materialitas—mengambil bentuk konsekuensi sosio-politis. Dengan mengelaborasi pandangan sosiologis Robert N. Bellah,<sup>6</sup> orientasi dan konteks pembicaraan Khomeini menemukan relevansinya, yakni tertuju pada praktik sosial diskriminatif sebagai dampak modernisasi dalam kaitannya dengan *western secularism* yang sedang berlangsung di negaranya selama periode monarki Pahlevi.<sup>7</sup> Sistem pemerintahan sekuler yang berakar kuat pada ideologi Barat inilah yang menjadi sasaran empuk Khomeini.

Sekalipun keberadaan sekularisme tidak lepas dari pro dan kontra, sebagaimana Donald Eugene Smith yang sepenuhnya mendukung separasi *domestic sphere* dan *public sphere* di komunitas Muslim, juga para pemikir Muslim progresif yang mengatakan bahwa Islam hanya mengatur relasi vertikal antara manusia dengan Tuhan, sehingga aturan horizontal, seperti tatanan kenegaraan sepenuhnya menjadi wewenang manusia. Pandangan ini kemudian memicu lahirnya pemikiran sekuler yang memisahkan secara diametral antara urusan agama dan politik,<sup>8</sup> sebagaimana pemikiran ‘Alī ‘Abd al-Rāziq (w. 1966)<sup>9</sup> dan Abdullahi Ahmed al-Na’im.<sup>10</sup> Berhadapan dengan gagasan sekuler tersebut, Khomeini menghadirkan satu kecenderungan yang berbeda dari mereka, yakni jangkauan Islam (syariat) yang luas dan meliputi seluruh spektrum kehidupan; agama tidak hanya eksis di ruang privat, tetapi menjangkau ruang publik, agama menjadi landasan dalam kehidupan dan kenegaraan, karenanya tidak terdapat separasi antara agama dan politik.

<sup>6</sup> Robert N. Bellah, *Beyond Belief: Essays on Religion in a Post-Traditionalist World* (London: University of California Press, 1991), 151.

<sup>7</sup> Nader Hashemi, *Islam, Secularism and Liberal Democracy: Toward a Democratic Theory for Muslim Societies* (New York: Oxford University Press, 2009), 138–139; Perihal westernization di Iran, lihat Nikki R. Keddie, *Modern Iran: Roots and Result of Revolution*, Updated. (London: Yale University Press, 2006), 133–137; Vali Nasr, “Religion and Global Affairs: Secular States and Religious Oppositions,” *SAIS Review (1989-2003)* 18, no. 2 (1998): 34–35, accessed December 7, 2023, <https://www.jstor.org/stable/45345784>.

<sup>8</sup> Budhy Munawar-Rachman, *Argumen Islam Untuk Sekularisme: Islam Progresif Dan Perkembangan Diskursusnya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 79–80.

<sup>9</sup> Lihat, ‘Alī ‘Abd al-Rāziq, *Al-Islām Wa Uṣūl al-Hukm* (Mesir: Dār al-Kitāb al-Miṣrī, 2012); Souad T. Ali, *A Religion, Not a State: Alī ‘Abd al-Rāziq’s Islamic Justification of Political Secularism* (Salt Lake City: The University of Utah Press, 2009), 70.

<sup>10</sup> Abdullahi Ahmed An-Na’im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari’a* (London: Harvard University Press, 2008), 1.

Implikasi praksis dari konsepsi tauhid Khomeini—memerangi rezim sekuler—termanifestasikan dalam bentuk tanggung jawab keagamaan yang memainkan peran sosio-politis kepada seorang mujtahid. Ihwal ini sejatinya bertolak dari logika Islam yang mengambil bentuk analogi kausalitas; adanya masyarakat di muka bumi, menuntut adanya upaya reformasi tatanan kehidupan masyarakat sesuai dengan aturan yang dikehendaki Tuhan. Dalam tradisi Syi'ah, logika Islam semacam itu termuat dalam komponen utama dari *framework* 'adl, yakni *takwini* dan *tashri'i*.<sup>11</sup> Bahwa kebijaksanaan Tuhan adalah menghendaki manusia untuk hidup dalam sayap keadilan dan bergerak dalam batas-batas ketetapan-Nya ('adl *takwini*). Kebijakan ini bersifat permanen dan menjadi satu hukum Ilahi yang tidak menerima perubahan. Kebijakan Tuhan ini dapat dirasakan sepenuhnya oleh umat manusia, jika ada upaya untuk menegakkan keadilan melalui sistem pemerintahan hukum Tuhan untuk rakyat ('adl *tashri'i*). Doktrin inilah yang memicu aksi nyata Khomeini untuk membasmi sistem tagut dengan mengambil peran dwifungsi, memimpin dalam urusan agama dan politik.<sup>12</sup>

### Religio-Politis: Strategi Khomeini dalam Mendirikan Sistem Pemerintahan Islam

Diseminasi wacana pemerintahan sekuler yang telah mapan di Iran bertujuan untuk menawarkan satu sistem pemerintahan yang benar (*al-hukūmah al-ṣāliḥah*) versi Khomeini. Nalar epistemik dari gagasan politiknya tergambarkan sangat kompleks, mulai dari basis pemikirannya yang mencakup kerangka teologis Syi'ah, tradisi 'irfani yang ia integrasikan dengan yurisprudensi (fiqh), teks Al-Qur'an dan hadis Nabi. Beberapa elemen tersebut diramu Khomeini untuk dijadikan sebagai strategi diskursif dalam mendirikan pemerintahan yang ia kehendaki, yakni pemerintahan yang berlandaskan pada aturan Tuhan (syariah). Gagasan terkait superioritas dan sentralitas hukum yang ditawarkan Khomeini dan yang eksis dengan istilah negara Islam ini bukanlah barang baru dalam dunia Islam. Namun gagasan Khomeini di sini identik dengan doktrin-doktrin Syi'ah, sehingga

<sup>11</sup> Ayatollah Ja'far Sobhani, *Doctrines of Shi'i Islam: A Compendium of Imami Beliefs and Practices*, ed. Reza Shah-Kazemi, trans. Reza Shah-Kazemi (London: I.B. Tauris, 2001), 28–29; Hamid Mavani, *Religious Authority and Political Thought in Twelver Shi'ism: From Ali to Post-Khomeini* (New York: Routledge, 2013), 45.

<sup>12</sup> Ruhullah al-Musawī Khumaynī, *Al-Hukūmah al-Islāmiyyah* (Beirut: Dār al-Walā', 2011), 60–63.

melahirkan wacana baru yang khas Khomeini.<sup>13</sup> Dari sini, kita dapat mengetahui bagaimana rasionalisasi Khomeini dalam memaksimalkan ranah praksis dari hukum Islam (fiqh)—dapat dikategorikan dalam kelompok maksimalis<sup>14</sup>—di negara modern.<sup>15</sup>

Strategi religio-politis yang Khomeini tawarkan untuk mengubah peran agama, yakni dari agen alienasi antara masyarakat dan negara terekam dalam pergumulannya dengan ayat-ayat politis yang tersaji dalam dua karya utamanya, yakni *Kashf al-Asrār* dan *al-Hukūmah al-Islāmiyyah*. Term *amanu*, *aṭi'ū Allah*, *aṭi'ū al-rasul* dan *ulū al-amr* dalam QS. al-Nisa' [4]: 59 adalah pancang teoretis untuk membicarakan hakikat tauhid, rezim tagut hingga rezim yang dikehendaki Tuhan. Khomeini menekankan pada term *ulū al-amr* (pemimpin pemerintahan), yang ia artikan bahwa pemimpin umat Islam adalah orang yang memenuhi kualifikasi sebagai figur yang ditaati, di mana hukum Tuhan yang tercantum di Al-Qur'an dan Sunnah telah menubuh di dalam dirinya sebagai bentuk ketaatan yang sejati kepada Tuhan.<sup>16</sup> Jika figur Nabi dan Imam merupakan representasi terbaik dari seorang pemimpin, dan karenanya, ketaatan kepada Nabi sama halnya dengan ketaatan kepada Tuhan, pertanyaan yang perlu kita ajukan adalah siapa pemimpin dalam pemerintahan yang Khomeini maksud untuk mengisi kegaiban Imam? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kiranya kita tidak bisa melepaskan Khomeini dari horizon 'irfani dalam dirinya. Karenanya, hasil pergumulannya dengan term *ulū al-amr* yang terpolarisasi pada satu konsepsi *al-faqih*, selain mengacu pada

<sup>13</sup> Vanessa Martin, "Religion and State in Khomeini's 'Kashf al-Asrār,'" *Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London* 56, no. 1 (1993): 42, accessed May 31, 2023, <https://www.jstor.org/stable/620286>.

<sup>14</sup> Istilah ini menunjukkan satu spektrum dalam diskursus politik Islam. Di satu sisi, terdapat para pendukung dari gagasan Islam sebagai suatu sistem total yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam, yang dituangkan dalam slogan-slogan seperti Islam sebagai *dīn wa dawla* (agama dan negara) atau *dīn wa dunya* (agama dan dunia). Di sisi lain, ada kelompok yang menganjurkan pembedaan antara agama dan politik. Istilah alternatif yang digunakan untuk menggambarkan dua kubu yang berlawanan ini adalah pandangan maksimalis mengenai peran agama dalam politik yang dianut oleh para 'conflationist' dan posisi minimalis dari 'de-conflationists'. Carool Kersten, *Contemporary Thought in the Muslim World: Trends, Themes and Issues* (New York: Routledge, 2019), 103.

<sup>15</sup> Ashk P. Dahlén, *Islamic Law, Epistemology and Modernity: Legal Philosophy in Contemporary Iran* (New York: Routledge, 2003), 12.

<sup>16</sup> Khomeini, *al-Hukūmah al-Islāmiyyah*, 64.

paradigma Syi'ah yang terintegrasi dalam dirinya, juga menunjukkan adanya asimilasi horizon dengan 'irfani.

Otoritas seorang *fāqih* dalam perspektif Khomeini mengacu pada konsep neo-Platonis, yakni pemikiran yang bertumpu pada konsep fundamentalnya al-Fārābī yang menafsirkan kepemimpinan dalam terang Republik Plato, hukum dan etika Aristoteles.<sup>17</sup> Visi al-Fārābī dan ibn 'Arabi pada gilirannya memengaruhi paradigma Mulla Sadra terhadap konsep *al-insān al-kāmil* dalam kaitannya dengan perjalanan empat tahap (*asfār al-arba'ah*) menuju penyatuan dengan yang Ilahi hingga kembalinya *al-insān al-kāmil* kepada komunitas masyarakat.<sup>18</sup> Dalam perspektif ini, ahli hukum yang berkuasa dalam pemikiran Khomeini mencerminkan sosok yang mencapai kualifikasi pemerintahan, yakni mereka yang memiliki kontak dengan Tuhan dan dimensi keilahian telah *inbern* dalam dirinya.<sup>19</sup> Dengan demikian,

---

<sup>17</sup> Abū Naṣr al-Fārābī, *Kitāb Arā' Ahl al-Madīnah al-Faḍīlah* (Beirut: Dār al-Mashriq, 1986); Fakhry Majid, *Al-Fārābī, Founder of Islamic Neoplatonism: His Life, Works and Influence* (England: Oneworld, 2002); Vanessa Martin, *Creating an Islamic State: Khomeini and the Making of New Iran* (New York: I.B.Tauris & Co Ltd, 2003), 34; Fauzi M. Najjar, "Fārābī's Political Philosophy and Shī'ism on JSTOR," *Studia Islamica*, no. 14 (1961), accessed April 18, 2023, <https://www.jstor.org/stable/1595185>.

<sup>18</sup> Empat perjalanan menuju keadaan sempurna yang diusung Sadra, lihat Muḥammad Ibrāhīm Ṣadr al-Dīn al-Shīrāzī, *Al-Hikmah al-Muta'āliyahfi al-Asfār al-'Aqliyyah al-Arba' Ah* (Beirut: Dār Ihya' al-Turāth, 1990); Perjalanan pertama adalah dari manuia ke Tuhan, dimana manusia meninggalkan dan membersihkan jiwanya dari hasrat keduniawian. Perjalanan kedua adalah perjalanan dengan Tuhan di dalam Tuhan, yakni upaya manusia untuk menenggelamkan dirinya dalam lautan rahasia dan misteri dalam rangka mengenal keindahan Tuhan. Perjalanan ketiga adalah perjalanan dari Tuhan kembali ke manusia, di mana ketika manusia kembali ke manusi, ia tidak terpisah dari Tuhan. Perjalanan terakhir adalah perjalanan manusia yang telah memperoleh sifat-sifat ketuhanan yang dengannya ia dapat membimbing dan membantu orang lain untuk menuju Tuhan. Pada perjalanan akhir inilah 'manusia sempurna' terwujud yang tergambarkan pada diri Imam. Ia wajib menegakkan wilayah (perwalian) di muka bumi, untuk membimbing manusia dan mendirikan masyarakat Islam. Baqer Moin, *Khomeini: Life of the Ayatollah* (United States: Thomas Dunni Books, 2000), 43–44; Mojtaba Mahdavi, "Ayatollah Khomeini," in *The Oxford Handbook of Islam and Politics*, ed. John L. Esposito and Emad El-Din Shahin (New York: Oxford University Press, 2013), 192–193.

<sup>19</sup> Rasoul Namazi, "Ayatollah Khomeini: From Islamic Government to Sovereign State," *Iranian Studies* (2019): 3, accessed November 25, 2023, [https://www.cambridge.org/core/journals/iranian-studies/article/abs/ayatollah-](https://www.cambridge.org/core/journals/iranian-studies/article/abs/ayatollah)

kepemimpinan Imam dalam revolusi Islam dan pendirian Republik Islam Iran merupakan tahap lebih lanjut dari proses perjalanan spiritual; buah dari perjalanan batin yang pada akhirnya terekspresikan dalam bidang politik. Argumentasi apologis Khomeini berikutnya adalah *ulū al-amr*, yakni orang yang dipilih Tuhan, dalam hal ini Nabi Muhammad; kemudian *Amir al-Mu'minin* yang ditunjuk Nabi, dalam teologi Syi'ah adalah Imam Ali; dan yang terakhir adalah hasil interpretasi Khomeini terhadap doktrin *intizār*, di mana sosok yang berada di balik tabir kegaiban (Imam Mahdi).<sup>20</sup> Bagian ini mengindikasikan gagasan sentralitas Nabi dan Imam dalam kepemimpinan, yang kemudian dipolitisir fungsinya kepada seorang mujtahid pada era kegaiban.

Premis utama yang Khomeini ajukan berkaitan dengan *faqih* adalah perundang-undangan atau pranata hukum membutuhkan eksekutor. Tanpa eksekutor, masyarakat akan tergerogoti oleh ketidakadilan, yang artinya hukum tidak akan menjamin kesejahteraan bagi manusia. Oleh karena itu, Islam telah membentuk kekuasaan eksekutif dengan cara yang sama seperti ia menciptakan undang-undang. Dengan demikian, orang yang memegang kekuasaan eksekutif ini dikenal sebagai *wali amr*.<sup>21</sup> Merujuk QS. al-Aḥzāb [33]: 6, peran Nabi Muhammad yang diandaikan sebagai figur sentral dan simbol kharismatik, tidak hanya memainkan peran sebagai eksekutor hukum Islam, melainkan juga sebagai perwalian dalam agama dan pemerintahan sekaligus.<sup>22</sup> Selain mengacu pada teks Al-Qur'an, hadis Nabi yang berupa *al-'ulamā' waraṣat al-anbiyā'*, Khomeini reinterpretasikan bahwa konteks riwayat tersebut tidak hanya perihal pewarisan keilmuan, namun merambah pada urusan perwalian dan kekhalifahan. Selain itu, riwayat Nabi yang berbunyi *'Alī wāriṣi*, ia tafsirkan secara tendensius, bahwa suksesi *Amir al-Mu'minin*—dikhususkan kepada Imam Ali—sebagai penerus otoritas Nabi sehubungan dengan misi kekhalifahan dan perwalian ahli hukum. Hal ini untuk menunjukkan bahwa pengangkatan *fuqaha'* adalah untuk menduduki kursi pemerintahan dan kekhalifahan.<sup>23</sup>

khomeini-from-islamic-government-to-sovereign-state/E2AD85CE370DAE835C45707F301AD3F1.

<sup>20</sup> Khumaynī, *Kashfu Al-Asrār*, n.d., 257.

<sup>21</sup> Khumaynī, *Al-Hukūmah al-Islāmiyyah*, 78; Khomeini, *Islam and Revolution: The Writings and Declarations of Imam Khomeini*, trans. Hamid Algar (New York: Routledge, 2010), 41.

<sup>22</sup> Khumaynī, *Al-Hukūmah al-Islāmiyyah*, 79.

<sup>23</sup> Khumaynī, *Al-Hukūmah al-Islāmiyyah*, 145–146.

Rasionalisasi Khomeini terhadap pemikiran Aḥmad al-Narāqī juga menjadi landasan dalam membicarakan otoritas *fāqih*. Merujuk pada riwayat yang Narāqī kutip dari Fiqh al-Raḍī,<sup>24</sup> bahwa status ahli hukum pada masa ini (menunjuk masa al-Raḍī) ibarat status para Nabi di kalangan Bani Israil. Otoritas Nabi yang secara spesifik merujuk pada Nabi Musa, Khomeini perluas pada perwalian dan pemerintahan, sama halnya dengan peran fuqaha.<sup>25</sup> Tanggung jawab keagamaan dalam bentuk *fāqih*—berikutnya disebut dengan *rahbar*—dapat ditinjau sebagai ekspresi dari pemahaman Khomeini terhadap *wilāyat al-tashrī'i*, yang semakin mengeras dengan adanya QS. Al-Nisā' [4]: 58. Term *amānāt*, ia tafsirkan bahwa pertanggungjawaban Nabi dan para Imam untuk memberikan perwalian kepada umatnya dengan menyebarkan keadilan di muka bumi, yang melampaui masalah sosial dan agama, dimanifestasikan dalam bentuk pemerintahan (*al-hukūmah*).<sup>26</sup> Dengan demikian, bagi seseorang yang telah termanifestasikan citra Ilahi dalam dirinya, maka termaktub satu pemikiran praksis bahwa tidak ada alternatif lainnya selain mendirikan pemerintahan yang adil, sebagaimana gagasan Khomeini yang telah saya uraikan di atas. Dari term *amānāt* inilah, kita menemukan akar genealogis dari peran dwifungsi seorang *fāqih*, yakni dengan memperluas makna praksis teks (amanat politik). Dengan demikian, untuk sampai pada gagasan supremasi pemerintahan di bawah agamawan, Khomeini menyintesis dua term, yakni *ulū al-amr* dan *amānāt* dalam QS. al-Nisā' [4]: 58-59.

Aktivitas radikal Khomeini untuk memutlakkan otoritas dwifungsi, selain ditelisik dari strateginya dalam memberdayakan internal tradisi Syi'ah dan 'irfan, juga dapat ditelisik dari strateginya dalam menghadapi *milieu* di mana ia tinggal. Seperti halnya *milieu* Paris yang mendorong Khomeini untuk banyak berbicara soal republik Islam (*jomhuri*) daripada pemerintah Islam (*hokumat*), sebab ia menyadari akan keengganannya masyarakat dalam menerima aturan ulama—untuk tidak

<sup>24</sup> Fiqh Ridha adalah nama sejumlah hukum fiqh yang oleh sebagian ulama dikaitkan dengan Imam Ridha. Namun, menurut Khomeini, beberapa orang ragu dengan validitas persentase tersebut. Khumaynī, *Al-Hukūmah al-Islāmiyyah*, 146; Aḥmad ibn Mahdī al-Narāqī, *'Awā'id al-Ayyām Fī Bayān Qawā'id Istinbāt al-Ahkām* (Beirut: Dār al-Hādī, 2000), 268.

<sup>25</sup> Said Amir Arjomand, "Traditionalism in Twentieth-Century Iran," in *From Nationalism to Revolutionary Islam*, ed. Said Amir Arjomand (London: The Macmillan Press LTD, 1984), 223.

<sup>26</sup> Khumaynī, *Al-Hukūmah al-Islāmiyyah*, 118–119.

mengatakan bahwa ia melepas gagasan *milāyat al-faqih*.<sup>27</sup> Bagi Schwerin, pergeseran *hokumat* ke *jomburi* ini hanya siasat temporal Khomeini, sebab ia menyesuaikan *milieu* Paris yang aktivis liberalnya lebih banyak daripada di Najaf. Selain itu, untuk memudahkan pergerakan politik Khomeini di Paris, pemantauan situasi Iran, pengaturan strategi untuk kembali ke Iran hingga pendirian Republik Islam, Khomeini merekrut beberapa kalangan, seperti Yazdi, Montazeri, Bazargan dan beberapa tokoh yang bertugas untuk membuat draf konstitusi, yakni Hassan Habibi, Ahmad Sadr Seyyed Javadi, Abbas Minachi dan Nasr Katouzian.<sup>28</sup> Dengan berbagai strategi politis, termasuk dalam memobilisasi masa, dan memaksimalkan jaringan akar rumput,<sup>29</sup> segala bentuk pemberontakan melawan rezim pada masa ini berlangsung sampai Shah melepaskan tahtanya hingga pergi meninggalkan negaranya pada 16 Januari 1979.<sup>30</sup> Kepergian Shah ini kemudian disusul dengan kembalinya Khomeini ke Iran yang dengan segera revolusi Islam Iran terpecahkan pada 11 Februari 1979.

## Kesimpulan

Khomeini tidak seperti Vladimir Lenin and Mao Zedong yang mengintelektualisasikan konsepsinya tentang revolusi bukan dari perspektif ideologis. Ia secara intelektual lebih fleksibel dalam menafsirkan ulang tradisi Syi'ah klasik, dan mengadaptasi teologinya dengan ide-ide 'irfani, hukum Islam, reinterpretasinya terhadap teks Al-Qur'an dan narasi hadis nabi, yang kemudian ide-ide tersebut mengakomodasi perubahan pandangan dunia politiknya. Strategi religio-politis tersebut berakar kuat dari paradigma tauhidnya yang tidak hanya terkungkung pada pemaknaan teologis, namun juga politis. Ide-ide teologis yang bertransformasi pada ide politik praksis ini menjadi dalil dari didirikannya sistem pemerintahan Islam Iran. Sekalipun Khomeini berhasil mewakili imajinasi sosial umat di Iran, kiranya gagasan praksisnya tersebut akan meninggalkan beragam warisan, dan yang paling utama adalah otoritarianisme baru.

<sup>27</sup> Yadullah Shahibzadech, *Islamism and Post-Islamism in Iran: An Intellectual History* (New York: Springer Nature, 2016), 84.

<sup>28</sup> Ulrich von Schwerin, *The Dissident Mullah: Ayatollah Montazeri and the Struggle for Reform in Revolutionary Iran* (London: I.B.Tauris & Co Ltd, 2015), 44–46.

<sup>29</sup> Barbara Ann Rieffer-Flanagan, *Evolving Iran: An Introduction to Politics and Problems in the Islamic Republic* (Washington: Georgetown University Press, 2013), 61–62.

<sup>30</sup> Vanessa Martin, *Creating an Islamic State: Khomeini and the Making of New Iran* (New York: I.B.Tauris & Co Ltd, 2003), 149.

## Referensi

- Algar, Hamid. "The Fusion of the Gnostic and the Political in the Personality and Life of Imam Khomeini." *Pajouheshnameh Matin* 2, no. 9 (December 21, 2000): 205–223. Accessed November 29, 2023. [https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article\\_182819\\_en.html](https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_182819_en.html).
- Ali, Souad T. *A Religion, Not a State: Ali 'Abd al-Raziq's Islamic Justification of Political Secularism*. Salt Lake City: The University of Utah Press, 2009.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. London: Harvard University Press, 2008.
- Arjomand, Said Amir. "Traditionalism in Twentieth-Century Iran." In *From Nationalism to Revolutionary Islam*, edited by Said Amir Arjomand. London: The Macmillan Press LTD, 1984.
- Azizkhani, Ahmad. "The Role of Tawhid in Formulating the Late Imam Khomeini's Political Discourse." *A Research Quarterly in Islamic Theology (kalam) and Religious Studies* 17, no. 64 (March 10, 2021): 105–126. Accessed November 18, 2023. <http://andishe.maaref.ac.ir/article-1-1154-en.html>.
- Bellah, Robert N. *Beyond Belief: Essays on Religion in a Post-Traditionalist World*. London: University of California Press, 1991.
- Cancian, Alessandro. "Sufi Mysticism and Uṣūlī Shi'ism: Practical Authority in Modern Iranian Shi'i Sufism." In *Shii Islam: Texts and Studies*, edited by Rodrigo Adem and Edmund Hayes. Vol. 2. Leiden: Brill, 2021.
- Dabashi, Hamid. *Theology of Discontent: The Ideological Foundation of the Islamic Revolution in Iran*. New York: Routledge, 2017.
- Dahlén, Ashk P. *Islamic Law, Epistemology and Modernity: Legal Philosophy in Contemporary Iran*. New York: Routledge, 2003.
- Esposito, John L. "Introduction: Islam and Muslim Politics." In *Voices of Resurgent Islam*, edited by John L. Esposito. Oxford: Oxford University Press, 1983.
- al-Fārābī, Abū Naṣr. *Kitāb Arā' Ahl al-Madīnah al-Faḍīlah*. Beirut: Dār al-Mashriq, 1986.
- Hashemi, Nader. *Islam, Secularism and Liberal Democracy: Toward a Democratic Theory for Muslim Societies*. New York: Oxford University Press, 2009.

- Keddie, Nikki R. *Modern Iran: Roots and Result of Revolution*. Updated. London: Yale University Press, 2006.
- Kersten, Carool. *Contemporary Thought in the Muslim World: Trends, Themes and Issues*. New York: Routledge, 2019.
- Khomeini. *Islam and Revolution: The Writings and Declarations of Imam Khomeini*. Translated by Hamid Algar. New York: Routledge, 2010.
- Khumaynī. *Kashfu Al-Asrār*, n.d.
- Khumaynī, Ruḥullah al-Musawī. *Al-Ḥukūmah al-Islāmiyyah*. Beirut: Dār al-Walā', 2011.
- Mahdavi, Mojtaba. "Ayatollah Khomeini." In *The Oxford Handbook of Islam and Politics*, edited by John L. Esposito and Emad El-Din Shahin. New York: Oxford University Press, 2013.
- Majid, Fakhry. *Al-Fārābī, Founder of Islamic Neoplatonism: His Life, Works and Influence*. England: Oneworld, 2002.
- Martin, Vanessa. *Creating an Islamic State: Khomeini and the Making of New Iran*. New York: I.B.Tauris & Co Ltd, 2003.
- . *Creating an Islamic State: Khomeini and the Making of New Iran*. New York: I.B.Tauris & Co Ltd, 2003.
- . "Religion and State in Khumaynī's 'Kashf al-Asrār.'" *Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London* 56, no. 1 (1993): 34–45. Accessed May 31, 2023. <https://www.jstor.org/stable/620286>.
- Mavani, Hamid. *Religious Authority and Political Thought in Twelver Shi'ism: From Ali to Post-Khomeini*. New York: Routledge, 2013.
- Moin, Baqer. *Khomeini: Life of the Ayatollah*. United States: Thomas Dunni Books, 2000.
- Munawar-Rachman, Budhy. *Argumen Islam Untuk Sekularisme: Islam Progresif Dan Perkembangan Diskursusnya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Najjar, Fauzi M. "Fārābī's Political Philosophy and Shi'ism on JSTOR." *Studia Islamica*, no. 14 (1961). Accessed April 18, 2023. <https://www.jstor.org/stable/1595185>.
- Namazi, Rasoul. "Ayatollah Khomeini: From Islamic Government to Sovereign State." *Iranian Studies* (2019). Accessed November 25, 2023. <https://www.cambridge.org/core/journals/iranian-studies/article/abs/ayatollah-khomeini-from-islamic-government-to-sovereign-state/E2AD85CE370DAE835C45707F301AD3F1>.

- al-Narāqī, Aḥmad ibn Mahdī. *‘Awā’id al-Ayyām Fī Bayān Qawā’id Istinbāt al-Aḥkām*. Beirut: Dār al-Hādī, 2000.
- Nasr, Vali. “Religion and Global Affairs: Secular States and Religious Oppositions.” *SAIS Review (1989-2003)* 18, no. 2 (1998): 32–37. Accessed December 7, 2023. <https://www.jstor.org/stable/45345784>.
- Nomani, Mohammad Manzoor. *Khomeini Iranian Revolution and the Shiite Faith*. London: Furqan Publication, 1988.
- al-Rāziq, ‘Alī ‘Abd. *Al-Islām Wa Uṣūl al-Ḥukm*. Mesir: Dār al-Kitāb al-Miṣrī, 2012.
- Rieffer-Flanagan, Barbara Ann. *Evolving Iran: An Introduction to Politics and Problems in the Islamic Republic*. Washington: Georgetown University Press, 2013.
- Schwerin, Ulrich von. *The Dissident Mullah: Ayatollah Montazeri and the Struggle for Reform in Revolutionary Iran*. London: I.B.Tauris & Co Ltd, 2015.
- Shahibzadech, Yadullah. *Islamism and Post-Islamism in Iran: An Intellectual History*. New York: Springer Nature, 2016.
- al-Shīrāzī, Muḥammad Ibrāhīm Ṣadr al-Dīn. *Al-Ḥikmah al-Muta’aliyah fi al-Asfār al-‘Aqliyyah al-Arba’Ah*. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth, 1990.
- Sobhani, Ayatollah Ja’far. *Doctrines of Shi’i Islam: A Compendium of Imami Beliefs and Practices*. Edited by Reza Shah-Kazemi. Translated by Reza Shah-Kazemi. London: I.B. Tauris, 2001.